

Pikiran Rakyat

DARI RAKYAT - OLEH RAKYAT - UNTUK RAKYAT



Independen
dan
tepercaya

BANDUNG, KAMIS (KLIWON) 12 MARET 2015

21 JUMADIL AWAL 1436 H - JUMADIL AWAL 1948 - HALAMAN 1

26

OPINI

e-mail: opini@pikiran-rakyat.com

Pikiran Rakyat

KAMIS (KLIWON) 12 MARET 2015

21 JUMADIL AWAL 1436 H

JUMADIL AWAL 1948

Reorientasi Diplomasi



Leonard F Hutabarat

Pemerhati Masalah Internasional,
Alumnus Institut d'Etudes
Politiques (IEP) de Paris

DALAM pernyataan pers pertamanya pada 2015, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menguraikan pandangan soal langkah dan tantangan kebijakan luar negeri dan diplomasi RI untuk lima tahun ke depan. Berpedoman pada arahan presiden bahwa kebijakan luar negeri harus berorientasi kepada rakyat (*diplomacy for the people*) dan membumi, Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya diplomasi yang terkoneksi secara konkret dengan kepentingan rakyat.

BAGAIMANA diplomasi yang prorakyat yang bukan *elite diplomacy*? Diplomasi yang membumi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan perdagangan dan investasi, memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di dunia internasional serta mengamankan kepentingan ekonomi strategis lainnya (Djumala, 2015).

Presiden Jokowi telah menempatkan rakyat pada pusat agenda pembangunan yang *people-centered policy*, termasuk diplomasi dan kebijakan luar negeri. Dengan visi itu, Menlu Retno Marsudi telah memprioritaskan diplomasi guna mendukung pencapaian hasil nyata bagi pemangku kepentingan dalam negeri, termasuk bagi petani, nelayan, maupun perajin UMKM. Hal ini jelas terlihat dari prioritas diplomasi ekonomi, bahkan Kemenlu juga telah membentuk Satgas Penguatan Diplomasi Ekonomi awal tahun 2015 ini. Dalam konteks bilateral, promosi perdagangan, pariwisata dan investasi juga akan lebih mewarnai aktivitas perwakilan Indonesia di luar negeri.

Diplomasi ekonomi

Indonesia kini dihadapkan pada kondisi global yang menimbulkan tantangan baru yang kian kompleks. Pembangunan, krisis keuangan global, krisis pangan dan energi merupakan isu internasional yang menjadi tantangan bagi seluruh negara, baik yang maju maupun yang berkembang. Kondisi ini sering menggecoh, sehingga setiap perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri sering dihadapkan pada ketidakpastian.

Meskipun dunia diplomasi bergerak dengan cepat sehingga sulit untuk diprediksi dan memiliki aneka nuansa dan semakin kompleks, tantangan bagi diplomasi Indonesia adalah bagaimana mengadopsi kondisi politik luar negeri kita yang bebas dan aktif ke dalam realitas baru abad ke-21 ini. Sistem internasional saat ini tidak lagi terstruktur dan hubungan antarnegara mengalami perubahan.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ke-16 tertinggi di dunia dan ke-3 di Asia, merupakan *middle power* dengan nilai-nilai universal yang dianutnya serta perannya dalam kepentingan global dan regional. Globalisasi ekonomi mau tidak mau semakin melibatkan Indonesia dengan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi bukan merupakan alternatif pilihan, tetapi merupakan suatu keniscayaan, mengingat globalisasi ekonomi akan terus melanda dunia, khususnya Indonesia.

Reorientasi

GR Berridge dan Alan James (2012) menekankan pentingnya upaya memformulasikan dan mengatur kebijakan yang terkait dengan produksi, pergerakan, dan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, atau sumber daya produksi lainnya dalam konteks hubungan internasional.

Di tengah kepercayaan terhadap perekonomian nasional, meskipun kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat, risiko yang tinggi terhadap gejolak keuangan global tetap ada. Sesuai dengan proyeksi Bank Dunia (2015), perekonomian Indonesia memang tumbuh ma'at pada angka 5%. Namun, jika dinilai dari gejolak aliran modal, tampak ekonomi negeri ini tidak kebal dari berbagai krisis seperti krisis zona Eropa yang telah terjadi saat ini, termasuk risiko kerentanan pemulihan ekonomi global.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global

pada tahun ini akan mencapai 3,0%. Namun, kenyataannya sebagian besar penduduk dunia juga belum merasakan kemajuan ekonomi, dan munculnya ungkapan "*don't tell me about the global economy, half the people aren't part of it, what kind of economy leaves half the people behind?*"

Oleh karena itu, peranan diplomasi ekonomi menjadi sangat strategis dalam menunjang perekonomian nasional yang tengah berkembang, untuk dapat mengakomodasi perkembangan ekonomi global yang tengah berada dalam ketidakpastian. Presiden Jokowi pada saat Rapat Kerja Pimpinan Kemenlu dan Kepala Perwakilan RI tahun 2015, menegaskan kembali bahwa mesin diplomasi ekonomi diupayakan untuk mendukung pencapaian target ekonomi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi harus mengeksplorasi pasar baru dan peluang bisnis bagi produk Indonesia dan investasi yang sejalan dengan pergeseran *world's economic center of gravity*.

Dari sejumlah capaian yang telah diraih politik luar negeri, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu penanganan lebih serius, antara lain peranan masyarakat di pusat dan di daerah, serta media massa sebagai bagian dari upaya implementasi diplomasi ekonomi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Konsep diplomasi ekonomi menegaskan kepentingan ekonomi dan politik saling memperkuat satu sama lain dan berjalan bersamaan (Okano-Heijmans, 2013). Hubungan luar negeri ditujukan untuk kepentingan ekonomi nasional dan untuk mencapai tujuan strategis nasional dengan *economic means*.

Diplomasi ekonomi sangat memainkan peran yang signifikan. Pertama, memperkuat kepentingan, memperpanjang politik domestik, dan mendukung pembangunan ekonomi dalam negeri. Kedua, memperkuat pe-

ngaruh internasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperkuat upaya diplomasi yang ada. Ketiga, meningkatkan lingkungan diplomatik yang mendukung situasi kerja sama dan perdamaian. Dan akhirnya, keempat, mencapai peluang ekonomi.

Untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi, Indonesia perlu menentukan strategi secara nasional, regional, dan internasional. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk melakukan reorientasi secara geoekonomi dan sektoral. Diplomasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang perlu lebih serius menggarap *prospective market*, bukan hanya bertumpu pada pasar tradisional. Indonesia perlu menetapkan sektor prioritas yang akan dikembangkan sehingga benar-benar mendukung ekonomi kerakyatan. Sebagai negara maritim dan kepulauan, sektor perikanan dan kelautan sepatutnya menjadi prioritas sektoral. Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan pangan selayaknya pula menjadi perhatian penting dalam diplomasi ekonomi, selain sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan budaya yang menjadi salah satu ujung tombak kekuatan ekonomi nasional.***